

قُلْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي الْكَلْبِ لَنَقُصَّ بِهَا الْقِصَّةَ لَكِنَّا لَنَجِدُ فِيهَا كَلِمَةً رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ

Vol. X, No. 2, Desember 2013

JURNAL

ISSN: 1829-5746

Pendidikan Agama Islam

DERADIKALISASI DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN
(Sketsa Awal tentang Peran Pendidikan Agama Islam)
Karwadi

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF-PLURALIS
(Kajian Pemikiran Filsafat Esoteris Seyyed Hossein Nasr)
Yu'timaalahuyatazaka

SUBSTANSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN
BUDI PEKERTI PADA SISWA DI SEKOLAH
Masruro

REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN RASULULLAH SAW
(Idealitas Pembelajaran Profetik Menuju Realitas
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang Lebih Baik)
Anji Fathunaja

PARADIGMA PEMBEBASAN
PENDIDIKAN HUMANIS RELIGIUS
(Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Pemikiran Ahmad Dahlan)
Syaifur Rohman

Diterbitkan oleh:



Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bekerja sama dengan



Himpunan Sarjana
Pendidikan Agama Islam

DERADIKALISASI DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN (Sketsa Awal tentang Peran Pendidikan Agama Islam)

Karwadi

Dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Tinggal di
Sorowajan RT 01/VIII Banguntapan Bantul. HP. 08156860616
e-mail: karwadi_71@yahoo.co.id.

Abstact

This paper is motivated by anxiety related to phenomena of seediness radical thinking in understanding the religion (Islam) in a society. The main issues covered are: why there is radicalization of religious understanding? What is the contribution of Islamic Education in conducting the de-radicalization of religious understanding? To answer these problems, the supporting data were collected from many views of thinkers in Islamic education in the forms of various written sources. The results of the study showed that the growth of radicalism in understanding the religion was caused by the exclusive - particularistic religious learning which tend to treat religion in a rigid and narrow manner. Thus, Islamic Education should be able to change the rigid and narrow views to be accommodative, tolerant and inclusive. The application of learning style - rational religious imperatives need to be developed so that Islam is not only considered as dogmatic teaching, but it is more functional for all human beings.

Kay Words: radical thinking, exclusive - particularistic, accommodative, tolerant and inclusive

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan terkait fenomena makin maraknya corak berfikir radikal dalam memahami agama (Islam) di tengah masyarakat. Persoalan pokok yang dibahas yaitu: mengapa terjadi radikalisasi pemahaman keagamaan? Apa kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam melakukan deradikalisasi pemahaman keagamaan? Guna menjawab masalah tersebut, dikumpulkan data pendukung yang bersumber dari berbagai pandangan para pemikir pendidikan Islam yang tertaung dalam berbagai sumber tertulis. Hasil kajian menunjukkan bahwa berkembangnya radikalisme dalam memahami agama disebabkan oleh corak pembelajaran agama eksklusif-partikularistik yang cenderung memperlakukan ajaran agama secara kaku dan sempit, mengklaim kebenaran dan intoleran. Dalam konteks ini Pendidikan Agama Islam harus mampu merubah pandangan kaku dan sempit menjadi akomodatif, intoleran menjadi toleran, dari eksklusif menjadi inklusif. Oleh karena itu penerapan corak pembelajaran agama secara rasional-imperatif perlu dikembangkan. Sebab, dengan corak ini Islam tidak hanya dipahami berdasarkan ajaran noramtif, tetapi juga menggunakan pendekatan rasional disertai bukti-bukti empiris, sehingga ajaran Islam tidak hanya dipandang sebagai dogma melainkan ajaran yang bersifat fungsional bagi manusia.

Kata Kunci: berpikir radikal, eksklusif-partikularistik, Pendidikan akomodatif, toleran, inklusif.

Pendahuluan

Secara asasi orang beragama tidak untuk menjadikannya berpikiran sempit, keras, kaku, tertutup, dan intoleran. Namun demikian, perlu dicatat, seperti ditulis oleh Bahtiar Effendy, kehadiran agama selalu disertai dengan “dua muka”. Pada satu sisi, secara inheren agama memiliki identitas yang bersifat eksklusif, partikularis, dan primordial. Akan tetapi pada waktu yang sama, agama juga kaya akan identitas yang bersifat inklusif, universal, dan transenden (Bahtiar Effendy, 2001: 7-8).

Namun demikian, agama dapat dikaitkan dengan radikalisme karena agama diajarkan dengan corak –sebagaimana disebut oleh Stark-- *eksklusif-partikularistik* (Radney Stark, 2003: 171). Corak penyebaran agama ini akhirnya menopang berkembangnya *partikularisme*, keyakinan bahwa agama yang dipeluknya adalah satu-satunya agama yang benar. Beberapa ciri penyebaran faham ketuhanan dengan corak *eksklusif-partikularistik* adalah penanaman keimanan yang kokoh dengan pendekatan doktrinernya, tanpa kompromi, dan normatif. Corak ini juga cenderung memposisikan diri secara berlawanan dengan faham yang berbeda dengannya. Karena itu, Stark berkesimpulan bahwa ketika beberapa agama yang menganut faham ketuhanan secara *eksklusif-partikularistik* yang kuat saling mengancam antara satu dengan yang lain, maka konflik akan termaksimalkan, begitu juga derajat intoleransi. Di sinilah agama bisa dikaitkan dengan radikalisme.

Radikalisme sebagai sebuah aliran atau faham, tidak muncul *automatically* dalam

diri seseorang. Ia memerlukan proses pengenalan, penanaman, penghayatan, dan penguatan. Proses inilah yang disebut dengan radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik, maka radikal menjadi faham atau *isme* sehingga menjadi radikalisme. Dan, salah satu karakter dasar dari sebuah faham (*isme*) adalah menuntut adanya loyalitas dari pengikut yang sering diwujudkan dalam bentuk keberpihakan, pembelaan, dan pembuktian. Dalam konteks ini, mudah difahami bila pengikut sebuah faham sanggup melakukan sesuatu yang terkadang berbahaya, menyimpang dari kebiasaan, aneh, dan merusak demi loyalitas.

Sementara itu, deradikalisasi adalah sebuah proses untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak; toleran, pluralis, dan moderat. Dengan demikian, deradikalisasi adalah *counter* radikalisasi. Jika radikalisasi melahirkan radikalisme yang ditandai dengan sikap kaku, keras, tanpa kompromi, maka deradikalisasi ditujukan untuk menjadikan seseorang menjadi lunak, toleran, pluralis, dan moderat. Hal yang perlu digarisbawahi dari radikalisasi dan deradikalisasi adalah keduanya memerlukan sebuah proses pengenalan, penanaman, penghayatan, dan penguatan. Proses ini, meskipun tidak sama persis dengan pendidikan, tetapi dapat dipertemukan. Sebab, sebagaimana diketahui pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan dan nilai yang di dalamnya juga meliputi kegiatan menjadikan seseorang mengenal, mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan. Pada titik inilah, radikalisasi dan deradikalisasi dapat dilihat

dari perspektif pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan pokok yang muncul kemudian adalah mengapa terjadi pemahaman agama secara radikal? Bagaimana Pendidikan Agama Islam (PAI) memberikan peran nyata terhadap upaya deradikalisasi pemahaman keagamaan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi fokus pembahasan tulisan ini.

Agama dan Radikalisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 808) kata radikal memiliki tiga pengertian: (1) secara mendasar/sampai kepada prinsip, (2) amat keras menuntut perubahan undang-undang, pemerintahan, dan (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Pengertian-pengertian tersebut sering digunakan dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu, makna kesan yang diberikan juga berbeda, positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, misalnya kata radikal dihubungkan dengan kegiatan berfikir filosofis, yang salah satu cirinya adalah mendalam, mendasar, sampai ke akar permasalahan. Sementara itu, makna yang memberikan kesan negatif tercermin pada pengertian nomor dua, yaitu amat keras menuntut perubahan. Pengertian ini mengindikasikan sikap kaku, keras, mau menang sendiri, memaksakan kehendak, tidak mau kompromi. Secara sosiologis, nampaknya kata radikal lebih sering difahami dengan pengertian yang disebutkan terakhir.

Selain kata radikal, ada radikalisme. Radikalisme dalam KBI (1996: 808) didefinisikan: (1) paham atau aliran yang

radikal dalam politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, (3) sikap ekstrem dalam suatu aliran. Definisi-definisi ini lebih dekat maknanya pada definisi radikal sebagai sikap keras dan kaku. Hal yang menarik dicermati adalah radikalisme banyak bersinggungan dengan masalah sosial dan politik. Ini mengisyaratkan bahwa berkembangnya radikalisme erat hubungannya dengan persoalan yang sarat dengan muatan kepentingan, baik sosial maupun politik. Jika hal ini benar, maka radikalisme boleh jadi tidak berhubungan dengan perjuangan menegakkan ajaran/agama, tetapi perjuangan untuk mewujudkan kepentingan politis tertentu.

Apakah beragama menjadikan seseorang berperilaku keras, kaku, memaksakan kehendak, mementingkan diri sendiri, dan tidak mau kompromi? Pertanyaan retorik ini tidak perlu jawaban. Sebab, jawabannya sudah jelas, yaitu: Tidak! Jika demikian, mengapa radikalisme sering dikaitkan dengan ajaran agama (termasuk Islam) dan penganutnya? Perlu dicatat, seperti ditulis oleh Bahtiar Effendy (2001: 7-8) kehadiran agama selalu disertai dengan "dua muka". Pada satu sisi, secara inheren agama memiliki identitas yang bersifat eksklusif, partikularis, dan primordial. Akan tetapi pada waktu yang sama, agama juga kaya akan identitas yang bersifat inklusif, universal, dan transenden.

Apakah hubungannya dengan radikalisme? Agama dapat dikaitkan dengan radikalisme karena beberapa kemungkinan. *Pertama*, agama diajarkan dengan corak—sebagaimana

disebut oleh Stark (2003: 171)-- *eksklusif-partikularistik*. Corak penyebaran agama ini akhirnya menopang berkembangnya *partikularisme*, keyakinan bahwa agama yang dipeluknya adalah satu-satunya agama yang benar. Beberapa ciri penyebaran faham ketuhanan dengan corak *eksklusif-partikularistik* adalah penanaman keimanan yang kokoh dengan pendekatan doktrinernya, tanpa kompromi, dan normatif. Corak ini juga cenderung memosisikan diri secara berlawanan dengan faham yang berbeda dengannya. Karena itu, Stark berkesimpulan bahwa ketika beberapa agama yang menganut faham ketuhanan secara *eksklusif-partikularistik* yang kuat saling mengancam antara satu dengan yang lain, maka konflik akan termaksimalkan, begitu juga derajat intoleransi. Di sinilah agama bisa dikaitkan dengan radikalisme.

Kedua, salah dalam pemosisian dimensi agama. Dimensi agama yang bersifat eksklusif, partikular, dan primordial adalah ranah pribadi pemeluk agama. Artinya, seorang pemeluk agama tidak salah apabila meyakini ajaran agamanya paling benar, paling mulia. Tetapi sekali lagi, itu adalah wilayah pribadi. Jika keyakinan ini dibawa ke ranah sosial, maka akan menimbulkan sikap mengkalim kebenaran (*truth claim*). Klaim kebenaran adalah salah satu benih tumbuhnya radikalisme. Seharusnya, ketika masuk ke ranah sosial yang dikedepankan adalah pandangan bahwa agama memiliki identitas yang inklusif, universal dan transenden sehingga berkembanglah sikap seperti dikatakan oleh Mukti Ali, *agree in disagreement*.

Ketiga, agama dijadikan alat legitimasi kepentingan kelompok. Dalam analisis Syamsul Arifin (2000: 56), pandangan eksklusif dan radikal terhadap agama dapat berkembang ketika ajaran agama dijadikan sebagai penopang perjuangan mewujudkan kepentingan kelompok. Akibat lebih lanjut, akan melahirkan *sektarianisme*, yang lebih menonjolkan ciri kelompok dan merasa paling hebat dan kampiun. Berdasarkan fenomena radikalisme yang terjadi, ada kesan faktor non agama seperti politik, ekonomi, etnis dan lain sebagainya cenderung ditempatkan sebagai sumbu pemicu terjadinya konflik antara kelompok agama yang satu dengan agama yang lain. Sementara agama acapkali hanya dimanfaatkan untuk melegitimasi.

Deradikalisasi: Harapan Terhadap PAI

Bertolak dari penjelasan terkait dengan kemungkinan hubungan agama dengan radikalisme terlihat secara jelas bahwa faktor dominannya tidak terletak pada tinggi-rendahnya pengetahuan agama. Oleh karena itu, radikalisme bisa dimiliki oleh orang yang memiliki pengetahuan agama cukup luas, atau sebaliknya bisa juga menjangkiti seseorang yang berpengetahuan agama terbatas. Faktor penentunya adalah corak ajaran agama yang diterima seseorang, penempatan agama dalam konteks pribadi dan sosial, serta "pemanfaatan" agama pada saat dibawa ke ranah perjuangan untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, pendidikan agama (utamanya PAI) dapat berperan dan harus diperankan dalam melakukan deradikalisasi. Perlu

ditegaskan, kita tidak sedang membicarakan konsep Pendidikan Agama Islam (PAI). Demikian juga, tidak ada keraguan tentang misi suci yang diemban oleh PAI sebagai *value education* untuk membangun karakter yang islami. Justru karena misi tersebut berbagai pihak memiliki harapan dan optimisme: PAI bisa menjadikan peserta didik yang memiliki watak inklusif dan menjadi rahmat bagi sekalian alam !

Bagaimana caranya? Cara paling efektif mengatasi masalah adalah dengan menemukan lawan dari masalah tersebut. Oleh karena itu, radikalisme diatasi dengan deradikalisme adalah tepat! Sayangnya, tulisan ini tidak sampai mengungkap *modus operandi* gerakan radikalisme, kecuali beberapa kemungkinan yang telah disebutkan terdahulu, sehingga kemungkinan langkah deradikalisme yang ditawarkan bukan lawan radikalisme. Beberapa tawaran berikut didasarkan pada target deradikalisme yang dikemukakan oleh Golose (2009: 79-86), yaitu: (a) melakukan *counter terrorism*, (b) mencegah proses radikalisme, (c) mencegah provokasi penyebaran kebencian dan permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak terorisme (f) memperkaya khazanah atas berbagai faham. Bertolak dari target tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kerangka deradikalisme melalui PAI, yaitu:

Langkah pertama, mengajarkan agama Islam dengan pendekatan *rasional-imperatif* (Stark, 2003: 27). Pendekatan ini adalah lawan dari *eksklusif-partikularistik*. Berkaitan

dengan penyebaran agama kecenderungan rasional imperatif lebih banyak menggunakan penjelasan rasional filosofis disertai bukti-bukti empiris. Agama tidak diimani hanya karena doktrin atau ajaran tertentu, melainkan diperoleh melalui proses pengkajian dan pembuktian induktif. Oleh karena itu, ketaatan kepada ajaran agama menjadi sesuatu yang memang secara rasional diperlukan, bukan semata didasarkan kepada keyakinan atau dogma. Dalam konteks PAI, ini berkaitan dengan (a) pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang —seperti dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga—integratif-interkoneksi, (b) pengayaan epistemologi keilmuan agama Islam yang tidak hanya wahyu, tetapi juga perlu diperkaya dengan epistemologi rasional, empiri, dan etik.

Secara praktis, jika selama ini materi PAI hanya meliputi pengertian, dalil-dalil normatif, tujuan, cara beragama secara benar, dan seterusnya, maka dalam semangat *integrated curriculum*, materi tersebut ditambah dengan dalil-dalil logika tentang adanya Tuhan, eksistensi Tuhan dari perspektif sains dan sebagainya. Dengan cara ini, diharapkan masalah agama tidak hanya berisi rambu-rambu normatif, tetapi juga berisi uraian filosofis-rasional. Perlu ditegaskan, hal ini tidak berarti menjadikan Tuhan sebagai obyek rasional atau menafikan pengetahuan yang bersifat normatif, tetapi dalam rangka menjadikan materi aqidah sebagai persoalan yang diyakini, baik secara dogmatis maupun rasional.

Di samping materi, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah metode pembelajaran. Dalam hal ini guru (pendidik)

memegang peran terpenting, sebab dialah yang memilih, menentukan dan menerapkan metode tertentu. Harus diakui, persoalan aqidah adalah persoalan keyakinan. Metode pembelajaran yang umum diterapkan adalah ceramah dengan pendekatan doktriner. Formulasi transedental demikian kuat, sehingga benar-benar menghilangkan antroposentrisme dalam pendidikan. Semua peserta didik digiring agar memahami “dunia luar” atau “dunia lain”, yang akan diketemukan nanti di akhirat. Tentu pengajarannya tentang hal eskatologis tidak salah, hanya saja amat disayangkan apabila pembelajaran aqidah secara serempak *disetting* demikian. Jelas yang terjadi adalah “proses pembisuan” peserta didik karena tidak ada ruang untuk berpikir secara rasional, apalagi pendidik (guru) dengan amat lancar mengemukakan dalil-dalil yang mendukung apa yang diajarkan.

Dalam konteks *integrated curriculum* metode pembelajaran agama adalah perpaduan antara paradigma teosentris dengan paradigma antroposentis. Beberapa hal harus dipenuhi. *Pertama*, guru harus memiliki kesadaran pentingnya perpaduan paradigma dalam pembelajaran aqidah. *Kedua*, guru dituntut memiliki pengetahuan normatif dan filosofis mengenai eksistensi Tuhan, dan ia memiliki kecakapan menyampaikannya. *Ketiga*, studi terhadap fenomena alam perlu lebih banyak dilakukan. Karena itu, metode pembelajaran dengan observasi, *out-bond* dan lain-lain yang berhubungan dengan fenomena alam akan sangat membantu. *Keempat*, perpaduan metodologis dalam pembelajaran aqidah harus tetap diletakkan

dalam kerangka saling melengkapi, bukan menghakimi antara satu sama lain, dan atau mempertentangkan. Sebab, dari sinilah lahirnya sinkronisasi dan harmonisasi.

Dalam kerangka ini, layak diperhatikan teori kesatuan kebenaran yang mendasari semua pengetahuan dalam Islam seperti dikemukakan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Menurutnya, ada tiga prinsip untuk mengukur keeneraan ilmu dalam Islam. (1) Berdasarkan wahyu kita tidak boleh membuat klaim yang bertentangan dengan realitas. (2) Tidak ada kontradiksi atau perbedaan antara nalar dan wahyu. (3) Pengamatan dan penelitian terhadap alam semesta mesti menyertai pengembangan ilmu-ilmu Islam dan tidak mengenal batas akhir (Ismail Raji Al-Faruqi, 1984: 58-62).

Langkah kedua, melakukan pergeseran orientasi pembelajaran agama Islam, dari sekedar menjadikan peserta didik mengetahui agama dan karenanya mau beragama, kepada pengembangan religiusitas. YB. Mangunwijaya (1994: 12) menegaskan dalam beragama bukan *to have religion* yang penting dan menentukan, akan tetapi *being religious*. Dalam *to have religion*, yang dipentingkan adalah formalism agama. Akibat lebih jauh adalah penganut agama menjadi formalis dan dogmatis. Dalam formalisme, agama menjadi mandeg sebatas doktrin, dan hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini mengandung kemutlakan, dan karena itu, menuntut penerimaan secara *taken for granted*. Sedangkan dalam *being religious* yang dibidik adalah penghayatan dan aktualisasi nilai-nilai luhur agama. Ini berkaitan dengan penekanan pada ranah

afektif dalam pembelajaran PAI.

Untuk mencapai tujuan keseimbangan ranah pengetahuan agama peran pendidikan (Islam) mutlak diperlukan. Dalam konteks inilah, Mahdi Ghulsyani menegaskan tidak dapat dielakkan bahwa prinsip-prinsip ilmiah mutakhir harus diajarkan di pusat-pusat teologi. Dan dalam cara yang sama, ilmu-ilmu agama harus diajarkan, atau paling tidak dapat diketahui, di universitas-universitas dan dikembangkan dengan seimbang. Ini akan menjadi sarana terjadinya persinggungan positif antara sains dan agama (Mehdi Ghulsyani, 1990: 60). Dapatkah pendidikan Islam mengambil peran dalam hal ini?

Jika merujuk kepada definisi pendidikan Islam sebagai “ proses arahan dan bimbingan untuk mewujudkan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya sehingga mereka siap menjalani kehidupan dengan baik di manapun dan kapan pun berdasarkan nilai-nilai Islam” (Yusuf Qardhawi, 1980: 157) maka pendidikan Islam mestinya menjadi pelopor bagi integrasi sains dan agama. Sebab, berdasarkan pengertian ini, terlihat secara jelas bahwa pendidikan Islam memberikan perhatian secara memadai terhadap eksistensi manusia. Manusia dalam pendidikan Islam diperlakukan sebagai makhluk yang memiliki unsur jiwa dan raga. Ia mempunyai organ-organ kognitif semacam hati, intelek (akal) dan kemampuan-kemampuan fisik. Organ-organ inilah yang diarahkan dan dibimbing dalam pendidikan Islam hingga menjadi pribadi yang utuh. Dalam bahasa yang agak berbeda, A. Yusuf Ali menyatakan bahwa

pendidikan Islam harus dapat memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan psikologis/intelektual dan kebutuhan fisik/biologis.

Usaha untuk memenuhi tiga kebutuhan di atas, tidak akan dapat dilakukan jika pendidikan Islam masih berkuat pada persoalan teologis semata. Dalam hal ini pendidikan Islam dituntut mampu memerankan dirinya sebagai lembaga keilmuan dengan pendekatan yang bersifat obyektif, rasional dan universal, berorientasi pada dunia pemikiran dan analitis-kritis yang menjadi ciri utama sains modern.

Di samping itu, proses PAI perlu secara konsisten diarahkan pada penanaman nilai-nilai fundamental Islam. Ketika nilai telah dilekatkan pada sebuah sistem, maka ia akan mencerminkan paradigma, jati diri dan *grand concept* dari sistem tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar pendidikan Islam bermakna konsep-konsep pendidikan yang dibangun berdasarkan ajaran Islam sebagai landasan etis, moral dan operasional pendidikan. Dalam konteks ini, nilai-nilai dasar pendidikan Islam menjadi pembeda dari model pendidikan lain, sekaligus menunjukkan karakteristik khusus.

Akan tetapi perlu ditegaskan, sebutan *Islam* pada pendidikan Islam tidak cukup dipahami sebatas “ciri khas”. Ia berimplikasi sangat luas pada seluruh aspek menyangkut pendidikan Islam, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi Islami yang mampu mengemban misi yang diberikan oleh Allah, yakni sebagai khalifah dan ‘*abid* (Ismail SM, dkk., 2001: 131). Ali Ashraf menyebutnya, *the ultimate aim of muslim education lies*

in the realization of complete submission to Allah on the level of the individual, the community and humanity at large (Ali Ashraf, 1398 H: 44) (tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah merealisasikan kepasrahan penuh pada Allah pada tingkat individual, komunitas dan umat).

Dengan demikian, pendidikan yang dijalankan atas nilai dasar Islam mempunyai dua orientasi. (1) Ketuhanan, yaitu penanaman rasa takwa dan pasrah kepada Allah sebagai Pencipta yang tercermin dari kesalahan ritual atau nilai sebagai hamba Allah. (2) Kemanusiaan, menyangkut tata hubungan dengan sesama manusia, lingkungan dan makhluk hidup yang lain yang berkaitan dengan status manusia sebagai *khalifatullah fi al ardh*. Berkaitan dengan tugas sebagai khalifah di muka bumi, manusia memerlukan sains agar dapat mengolah dan memakmurkan bumi secara optimal. Ini menjadi salah satu nilai yang harus mendapat respon memadai dari pendidikan Islam.

Langkah ketiga, menghilangkan sikap ambivalensi dalam pendidikan Islam agar tidak timbul pandangan yang dikotomis, yakni pandangan yang memisahkan secara tajam antara tujuan ilmu dan agama, sementara ilmu merupakan alat utama dalam menjangkau kebenaran yang menjadi tujuan agama. Salah satu dampak dari adanya dikotomi ilmu (Ziaduddin Sardar, 1986: 75), terutama di Indonesia adalah munculnya ambivalensi orientasi pendidikan Islam (AM. Saefuddin, 1991: 103). Sementara ini, dengan pendidikan pesantren, masih dirasakan adanya semacam kekurangan dalam program pendidikan yang diterapkan.

Misalnya, dalam bidang mu'amalah (ibadah dalam arti luas) yang mencakup penguasaan berbagai disiplin ilmu dan ketrampilan, terdapat anggapan, bahwa seolah semua itu bukan merupakan bidang garapan pendidikan Islam, melainkan bidang garapan khusus sistem pendidikan umum (sekuler).

Dalam hubungan ini, Ziaduddin Sardar (1986: 280-281) menawarkan solusi untuk menghilangkan ambivalensi orientasi pendidikan, yakni dengan cara meletakkan epistemologi dan teori sistem pendidikan yang bersifat mendasar. Menurutnya, untuk menghilangkan sistem pendidikan dikotomis di dunia Islam perlu dilakukan usaha-usaha berikut: *Pertama*, dari segi epistemologi, umat Islam harus berani mengembangkan kerangka pengetahuan masa kini yang terartikulasi sepenuhnya. Ini berarti kerangka pengetahuan yang dirancang harus aplikatif, tidak sekedar teoritis saja. Kerangka pengetahuan dimaksud setidaknya dapat menggambarkan metode dan pendekatan yang tepat dan dapat membantu para pakar muslim dalam mengatasi masalah-masalah moral dan etika yang sangat dominan di masa sekarang ini. *Kedua*, perlu ada kerangka teoritis ilmu dan teknologi yang menggambarkan model dan metode ilmiah yang sesuai tinjauan dunia serta mencerminkan nilai dan budaya muslim *Ketiga*, perlu diciptakan teori tentang sistem pendidikan yang memadukan ciri-ciri terbaik sistem tradisional dan sistem modern. Sistem pendidikan integralistik itu secara sentral harus mengacu pada konsep ajaran Islam, misalnya konsep *tazkiyah al nafs, tauhid*, dan sebagainya. Di samping

itu, sistem tersebut juga harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim secara multidimensional masa depan.

Tampaknya, metode penyelesaian dikotomi yang ditawarkan Sardar di atas cukup mendasar. Karenanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun demikian, bila diusahakan secara serius dan berkelanjutan diyakini akan memberikan hasil nyata.

Langkah keempat, sekolah/madrasah/kampus/keluarga dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran agama harus mampu menjadi *caring community* (masyarakat yang peduli/berpihak). Istilah *caring community* dipinjam dari Goleman (1995: 323) yang berhubungan dengan pengembangan kecerdasan emosional. Namun demikian, nampaknya juga relevan diwujudkan dalam konteks deradikalisasi melalui PAI. Dalam banyak kasus, oknum-oknum yang akhir-nya memiliki faham radikal adalah mereka yang mengalami masalah pribadi, misalnya kekecewaan karena sebab-sebab tertentu, ketidakpuasan terhadap keadaan, *galau*, terpuruk, terasing dari lingkungan, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, tampil pihak-pihak tertentu menjadi pembela, penyedia apa yang mereka perlukan, teman dekat yang bersedia mendengarkan berbagai curahan persoalan, melindungi, memberikan kenyamanan, dan seterusnya. Tahap selanjutnya, terjadilah apa yang sering disebut dengan *brain-washing* (pencucian otak) sehingga oknum-oknum tersebut mudah dikendalikan. Di sinilah pentingnya sekolah/ madrasah/kampus/keluarga dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembelajaran agama sebagai

komunitas yang peduli, *care*, memberi rasa aman, nyaman, dan sanggup memenuhi ekspektasi peserta didik. Dalam hubungan ini, komunikasi yang komunikatif, hubungan yang harmonis, keterbukaan dan saling pengertian antar elemen pendidikan mutlak diperlukan.

Penutup

Seperti tercermin pada judul, hal-hal yang dikemukakan dalam tulisan ini baru dalam bentuk sketsa. Sketsa umumnya baru berbentuk guratan atau goresan yang membentuk pola tertentu, tetapi masih belum jelas dan rinci. Karena itu, tawaran-tawaran yang dikemukakan dalam tulisan ini masih bersifat umum, teoritis, belum bersifat praktis. Selain itu, terbuka kemungkinan untuk ditambah dengan goresan-goresan lain, sehingga sketsa yang dibentuk makin variatif dan indah.

Satu hal yang perlu digaris-bawahi, meningat radikalisme dan deradikalisasi adalah sebuah proses sebagaimana pendidikan, maka proses Pendidikan Agama Islam dapat diberdayakan sebagai media deradikalisasi. Kuncinya adalah PAI dikembalikan kepada khittah awal sebagai *value education*, yang mampu menjadi peserta didik memiliki karakter Islami, ditandai dengan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Guna mewujudkannya, PAI harus diajarkan dengan pendekatan *rasional-imperatif*, berorientasi pada perwujudan manusia yang *being religious*, didukung oleh masyarakat yang peduli. PAI harus diarahkan untuk

merubah *mind-set* peserta didik dari eksklusif menjadi inklusif.

Wallaahu A'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ashraf, *Crisis in Moslem Education*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1398 H.
- Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Depdiknas, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Goleman, Daniel, *Emotional Intelligence, Why it Can Matter More Than IQ*, New York: Bantam Books, 1995.
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Ismail SM, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ismail Raji Al-Faruqy, *Islamization of Knowledge, General Principles and Workplan*, Lahore: Idarah Adabaiti, 1984.
- Mahdi Ghulsyani, *Filsafat-Sains Menurut Al-Qur'an*, terjemah oleh Agus Effendi, Bandung: Mizan, 1990
- Stark, Rodney, *One True God, Resiko Sejarah Bertuhan Satu*, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Penerbit Qalam dan Nizam Press, 2003.
- Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru dalam Beragama*, Yogyakarta: ITTAQA Press, 2000.
- YB. Mangunwijaya, "Pergeseran Titik Berat dari Keagamaan ke Religiusitas", dalam Ahmad Suaedy, et. all., (ed.), *Spiritualitas Baru; Agama dan Aspirasi Rakyat*, Seri Dian II, Tahun 1994.
- Yusuf Qardlawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, terjemah oleh Bustani A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ziaduddin Sardar, *Rekayasa masa Depan Peradaban Muslim*, terjemah oleh Rahma Astuti, Bandung: Mizan, 1986.